

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbicara tentang pemimpin dan kepemimpinan masa depan, erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia yang di miliki oleh bangsa ini. Salah satu sumber daya manusia yang menjadi penentu keberhasilan instansi/lembaga adalah pemimpin. Seorang pemimpin merupakan unsur yang sangat berpengaruh dalam menjalankan sebuah instansi/lembaga. Seorang pemimpin harus mempunyai jiwa atau keahlian dalam mengontrol dan mempengaruhi segala yang menyangkut jalannya sebuah instansi/lembaga yang dipimpinnya dengan kata lain bahwa seorang yang berkeinginan untuk menjadi pemimpin haruslah mempunyai jiwa kepemimpinan karena tanpa hal itu akan mustahil seseorang untuk memimpin instansi/lembaga. Kiranya tidak dapat disangkal bahwa keberhasilan suatu instansi/lembaga baik sebagai keseluruhan maupun berbagai kelompok dalam suatu instansi/lembaga tertentu, sangat tergantung pada mutu kepemimpinan yang terdapat dalam instansi/lembaga yang bersangkutan.¹

Salah satu defenisi tentang kepemimpinan dikemukakan oleh Ordway Tead dalam bukunya “*The Art of Leadership*” yang artinya kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.² Dengan kata lain kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan

¹ Kartini dan Kartono. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001, hlm 57.

² Hidayat, *Analisis Gaya Kepemimpinan Rusli Zainal Sebagai Kepala Pemerintahan Provinsi Riau*, Volume 1 NO. 1 Tahun 2012 Edisi Maret, hlm 21.

seseorang untuk mempengaruhi orang lain, melalui komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang tersebut agar dengan penuh pengertian, kesadaran dan senang hati bersedia mengikuti kehendak pemimpin itu. Setiap individu berhak untuk menjadi seorang pemimpin selama ia memiliki kemampuan dan mendapatkan pengakuan dari lingkungan masyarakatnya.³

Masalah kepemimpinan di negara kita, maka pada akhirnya akan membahas mengenai masalah pemerintahan yang dilaksanakan di Indonesia, dan dalam hal ini peneliti tertarik untuk membahas masalah kepemimpinan dari pemerintahan di tingkat daerah. Karena hal ini berkaitan langsung dengan masalah perubahan kehidupan sosial, ekonomi dan politik dari masyarakat di daerah yang mereka pimpin. Berbagai macam persoalan yang dihadapi masyarakat akhir-akhir ini selalu dikaitkan dengan permasalahan otonomi daerah. Persoalan yang sangat mendasar adalah implementasi yang tidak teratur dalam penerapan otonomi daerah. Untuk itu, dalam hal ini masyarakat juga harus mengetahui bagaimana pemerintahnya memimpin dan mengatur urusan pemerintahan mereka, agar mereka juga ikut berpartisipasi dalam menyukseskan penerapan otonomi daerah di daerah mereka.⁴

Pemilihan pemimpin yang berkualitas memerlukan partisipasi masyarakat. Dari krisis kepemimpinan yang terjadi di Indonesia dapat diambil pelajaran bahwa

³ Hadari Nawawi. *Kepemimpinan Yang Efektif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, Press, 2006, hlm 5.

⁴ Yuan Ihsan, *Analisis Gaya Kepemimpinan Fauzi Bahar Sebagai Walikota Padang Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang, 2011.

rekrutmen pemimpin semestinya berjalan melalui proses-proses atau tahapan penjarangan yang jujur dan adil maksudnya untuk membangun prosedur dan mekanisme yang bisa melahirkan pemimpin-pemimpin pemerintahan yang handal, yang bukan saja mempunyai kapabilitas dan integritas yang tinggi, tetapi juga komitmen untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan demokratis. Dalam hubungan ini maka semua komponen, baik dalam suprastruktur maupun infrastruktur harus bekerjasama dalam membangun visi dan persepsi yang sama guna mewujudkan tujuan suatu instansi/lembaga yang sekaligus menjadi dambaan bagi masyarakat.⁵

UU No 32 tahun 2004 kemudian direvisi menjadi UU No 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah dan masih dipakai hingga saat ini. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, Otonom berarti pemerintahan sendiri. Sedangkan menurut Undang-undang No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah merupakan: hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita mengetahui bahwa lahirnya Undang-Undang tersebut sebagai korelasi atas ketimpangan pembangunan antara daerah dan pusat. Fakta ketimpangan antara daerah yang telah berlangsung lama, menjadi bagian

⁵ J. kaloh. *Kepemimpinan Kepala Daerah* (Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 43.

dari kenyataan-kenyataan konkret yang mendorong tuntutan perubahan hubungan daerah dan pusat.⁶

Pemberian wewenang dari pusat kepada pemerintah daerah agar pemerintah daerah mampu mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan rumah tangga dan daerahnya, partisipasi rakyat dapat di bangkitkan dan pembangunan benar-benar di arahkan kepada kepentingan nyata daerah yang bersangkutan, karena pemerintah daerah yang paling meengetahui kepentingan dan kebutuhan daerahnya.

Kemunculan otonomi daerah juga diikuti dengan hadirnya pemimpin-pemimpin daerah yang saling bersaing untuk memajukan daerahnya masing-masing dan sosok-sosok pemimpin ini dapat dipilih langsung oleh masyarakat melalui pilkada. Dengan adanya pemilihan langsung kepala daerah, masyarakat dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginan dan kriteria yang dibutuhkan oleh daerah tersebut. Pemilihan langsung ini dianggap lebih demokratis karena kepala daerah yang akan menjabat berasal dari pilihan masyarakat tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat. Dengan begitu untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing, sudah seharusnya diatur oleh kepala daerah dengan sebaik-baiknya sehingga kepala daerah benar-benar dapat menjawab permasalahan seputar bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan hal ini bertumpu pada peranan dan tanggung jawab seorang pemimpin.⁷

⁶ UU No. 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah.

⁷ Abdul Gaffar Karim, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm 176.

Upaya seorang pemimpin untuk mengembangkan suatu daerah yang dipimpinnnya tidak terlepas dari gaya kepemimpinannya yang dipakai oleh pemimpin tersebut. Suatu instansi/lembaga dapat mencapai tujuan dan memperoleh keberhasilan juga ditentukan oleh kepemimpinan seseorang, begitu juga dalam kepemimpinan di sebuah daerah.⁸ Sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan dan kegagalan yang terjadi dari sebuah instansi/lembaga tergantung dari kepemimpinan pemimpinnya yang mewakili wewenang penuh dalam sebuah pemerintahan. Pemimpin merupakan hal yang mutlak diperlukan kelompok masyarakat maupun instansi agar dapat mengatur dan menjalankan tujuan bersama dengan baik.

Karena menurut Sondang P. Siagian tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan suatu instansi/lembaga baik sebagai keseluruhan maupun berbagai kelompok dalam suatu instansi/lembaga tertentu, sangat bergantung terhadap mutu kepemimpinan yang terdapat dalam instansi yang bersangkutan, bahkan dapat kiranya diterima sebagai “truisme” apabila dikatakan bahwa mutu kepemimpinan yang terdapat dalam suatu instansi memainkan peran yang sangat dominan dalam keberhasilan instansi tersebut dalam menyelenggarakan pemerintahannya.⁹

Dalam halnya sebuah instansi, faktor kepemimpinan juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah pemerintahan, bagaimana seorang kepala pemerintahan dalam memimpin, mengontrol, dan memaksimalkan sumber daya yang ada pada elemen dibawah pimpinannya, yaitu itu sumber daya manusia, maupun sumber daya

⁸ Ibid, hlm 176.

⁹ Sondang P. Siagian, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Rineka Cipta: Jakarta, 1999, hlm. 30.

lainnya.¹⁰ Ada beberapa alasan mengapa seorang pemimpin diperlukan didalam masyarakat maupun instansi/lembaga, yaitu: a) karena banyak orang memerlukan figur pemimpin, b) dalam beberapa situasi seorang pemimpin perlu mewakili kelompoknya, c) sebagai tempat pengambilan resiko bila terjadi tekanan terhadap kelompoknya, d) sebagai tempat untuk meletakkan kekuasaan.¹¹

Menurut peraturan daerah Kabupaten Muaro Jambi No 28 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah dan staf ahli bupati Kabupaten Muaro Jambi.¹² Pada tahun 2017 lalu Provinsi Jambi telah diadakan pemilihan kepala daerah di tiga daerah yakni Muaro Jambi, Tebo, dan Sarolangun. Pada pemilihan kepala daerah di Provinsi Jambi ini, terdapat fenomena yang menarik dimana untuk Kabupaten Muaro Jambi yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, terdapat calon perempuan yang maju sebagai calon Bupati untuk masa pemerintahan periode 2017-2022. Calon Bupati perempuan ini berhasil mengalahkan calon Bupati dan Wakil Bupati lain yang semuanya adalah laki-laki. Selain itu Bupati ini menjadi Bupati perempuan pertama di Kabupaten Muaro Jambi.

Masyarakat Kabupaten Muaro Jambi menorehkan sejarah baru mempercayakan dan memilih seorang perempuan untuk menjabat Bupati Muaro Jambi periode 2017-2022. Bupati Muaro Jambi Hj. Masnah Busro, SE yang dilantik Gubernur Jambi H.

¹⁰ Afdharul Fanisa, *Analisis Perbandingan Tipe Kepemimpinan Walinagari Perempuan di Nagari Tigo Balai dan Nagari Sulik Aia Periode 2014-2022*. Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang, 2017.

¹¹ Deddy Mulyadi, Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012, hlm. 2.

¹² UU No 28 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah staf ahli bupati kabupaten muaro jambi.

Zumi Zola Zulkfli atas nama Menteri Dalam Negeri (mendagri). Masnah Busro mencatat sejarah perpolitikan di Kabupaten Muaro Jambi. Dia satu-satunya kepala daerah (bupati) perempuan hasil pilkada serentak, rabu 15 february 2017 lalu. Diusia ke 60 tahun Provinsi Jambi, kali pertama Bupati muncul dari kaum hawa. Bahkan perolehana suara Masnah Buaro yang sebelumnya kader Golkar dan akhirnya diusung PAN dan PKB dalam pilkada serentak berhasil menyisihkan tiga paslon pesaingnya.¹³

Setelah terpilih menjadi Bupati Muaro Jambi, Masnah Busro kemudian membuktikan bahwa perempuan juga dapat memimpin suatu daerah dan membawa daerah yang dipimpinnya menjadi daerah yang lebih baik. Hal ini terbukti dengan beberapa prestasi yang diperoleh Muaro Jambi dalam beberapa bidang perlombaan di tingkat nasional. Salah satu prestasinya adalah mampu mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan hasil pemeriksaan LHP laporan keuangan pemerintah Muaro Jambi pada tahun 2017 dan 2018, oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Penerimaan predikat opini WTP ini terasa sangat istimewa karena telah hilang dua tahun belakangan ini dan kembali dapat diraih berkat kerja keras seluruh jajaran OPD pemerintah Muaro Jambi. Selain itu terdapat beberapa prestasi lain yang telah diraih oleh Muaro Jambi pada masa kepemimpinan Bupati Masnah Busro, seperti pada gambar dibawah ini:¹⁴

¹³ Jambipos-online, Hj. Masnah Busro, SE Bupati Perempuan Pertama Di Provinsi Jambi. <http://www.jambipos-online.com/2017/05/hj-masnah-busro-se-bupati-perempuan.html>. Diakses pada tanggal 4 september 2018 pukul 11.26 wib.

¹⁴ Syarif, raih WTP Bupati Masnah Busro Apresiasi OPD Muaro Jambi. Sumber: <https://jambi.antaranews.com/berita/326918/raih-wtp-bupati-masnah-apresiasi-opd-muaro-jambi>. diakses pada tanggal 20 juli 2018 pukul 22.30 wib.

Gambar 1.1
Pemerintah Muaro Jambi Menerima Penghargaan
Dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Dalam Kategori
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Terhadap Laporan Pemeriksaan
Keuangan

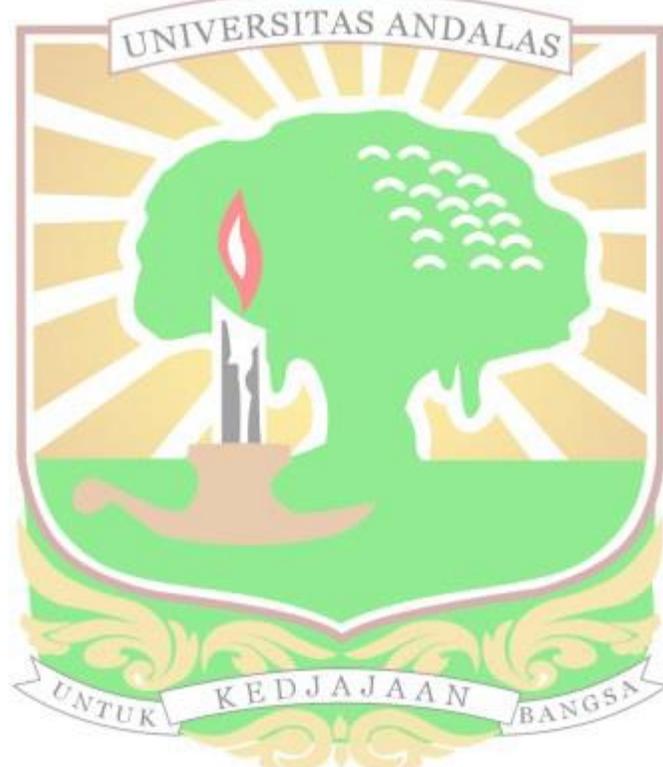


Sumber: bagian organisasi pemerintahan kabupaten muaro jambi

Dari gambar I.I di atas dapat dilihat bahwa Bupati menerima penghargaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI prestasi ini merupakan untuk keempat kalinya di peroleh pemerintah Provinsi Jambi. Dari 11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi hanya ada 7 Kabupaten/Kota yang mendapatkan Opini WTP dari BPK RI, diantaranya Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh. Namun dua diantaranya di dapat secara berurutan oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dibawah kepemimpinan Bupati Masnah Busro dan Wakil Bupati Bambang Bayu Suseno.¹⁵

¹⁵ Berita jambi. Ini Daftar Daerah Se-Provinsi Jambi Yang Mendapatkan Opini WTP Dari BPK RI Tahun 2018. Sumber: <http://beritajambi.co/read/2018/05/29/4096/ini-daftar-7-daerah-se--provinsi-jambi-yang-mendapatkan-opini-wtp-dari-bpk-ri-tahun-2018>. diakses pada tanggal 20 juli 2018 pukul 22.35 wib.

Keberhasilan Kabupaten Muaro Jambi dari segala bidang tersebut tentunya tidak terlepas dari sosok pemimpin yang menggerakannya. Bupati Muaro Jambi adalah salah satu kepala daerah yang mempunyai gaya kepemimpinannya sendiri. Sebagai Bupati di daerah Kabupaten Muaro Jambi di Provinsi Jambi selain pencapaian-pencapaian yang telah di jelaskan diatas Bupati juga telah menorehkan beberapa prestasi selama masa pemerintahannya yang dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 1.1
Prestasi Kabupaten Muaro Jambi Periode 2017-2018

No.	Prestasi	Tahun
1.	Bupati Muaro Jambi terima award 2018 dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jambi, dikarenakan Bupati Masnah Busro sebagai inspirator kesetaraan gender dan merupakan satu-satunya bupati perempuan di Provinsi Jambi	2018

- | | | |
|----|---|------|
| 2. | Bupati Muaro Jambi menerima penghargaan Paramesti dari Menteri Kesehatan (MENKES) RI. Dikarenakan pemimpin daerah berhasil menetapkan peraturan daerah (perda) dan kebijakan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak-anak serta masyarakat dan pengendalian konsumsi hasil tembakau. | 2017 |
| 3. | Bupati Masnah Busro menerima penghargaan berupa piagam penghargaan opini WTP terhadap LKPD Kabupaten Muaro Jambi dari Menteri Keuangan RI | 2017 |
| 4. | Bupati Muaro Jambi menerima penghargaan dari menteri ekonomi RI, dengan kategori pemerintahan yang berprestasi telah melaksanakan kegiatan pemetaan batas-batas desa. dalam kesempatan tersebut hanya ada lima daerah se-Indonesia yang diberikan penghargaan oleh menko ekonomi yakni, Kab. Muaro Jambi, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi NTB, dan Kab. Mamusa | 2017 |
| 5. | Bupati Muaro Jambi menerima penghargaan dari Ombudsman RI. | 2018 |
| 6. | Bupati Masnah Busro menerima piagam penghargaan dari kementerian keuangan RI | 2018 |
| 7. | Bupati menerima penghargaan kesetiakawanan sosial dari Menteri Sosial Khofifah Indah Parawansa | 2017 |
| 8. | Bupati menerima penghargaan dari Menkumham RI atas kepedulian pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terhadap HAM. | 2018 |

Sumber: bagian organisasi pemerintahan kabupaten mauro jambi tahun 2018

Dari beberapa prestasi tersebut tentunya tidak terlepas dari gaya kepemimpinannya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Hal ini tentu nya menjadi kepuasan sendiri bagi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. Kemampuan seorang Bupati dalam memimpin bawahannya juga menjadi hal yang menentukan

keberhasilan sebuah instansi/lembaga. Kabupaten Muaro Jambi menjadi berprestasi tentu dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Bupati Muaro Jambi tersebut. Hal ini dilihat dari kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang dilakukan Bupati dalam memimpin instansinya.¹⁶

Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat bahwa kepemimpinan yang dimiliki oleh Bupati Muaro Jambi berpengaruh terhadap keberhasilan yang dicapai oleh instansi/lembaga tersebut. Serta individual Masnah Busro, SE sebagai Bupati juga mendapatkan sederet prestasi, salah satunya yakni menerima Award dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jambi pada peringatan Hari Pers Nasional. Pada kesempatan tersebut, Bupati yang diwakili oleh Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno menerima Award sebagai Bupati Inspirator Kesetaraan Gender yang diserahkan langsung oleh Ketua PWI Jambi Saman S.Pt. Award yang diterima Bupati sebagai Inspirator Kesetaraan Gender ini diharapkan bisa menjadi pelecut semangat bagi para srikandi-srikandi Jambi bisa berbuat lebih lagi di segala bidang. Contohnya apa yang sudah dilakukan Bupati. Seorang wanita yang dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan beliau bisa menjadi pemimpin di Muaro Jambi.¹⁷

Gambar 1.2

¹⁶ Sri Rahayu, *Gaya Kepemimpinan Lurah Banda Buek Periode 2022-2016*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Andalas, 2017.

¹⁷ Hadiyatullah, Bupati Mauro Jambi Terima Award Dari PWI Jambi. Sumber: <http://www.tuntas.co.id/2018/05/bupati-muarojambi-terima-award-dari-pwi.html>. diakses pada tanggal 10 april 2018 pukul 14.13 wib.

**Bupati Menerima Award Inspirator Kesetaraan Gender
Dari Persatuan Wartawan Indonesia
Tahun 2018**



Sumber: Dokumentasi Bupati Muaro Jambi Tahun 2018

Bupati Masnah Busro, SE di dalam memimpin juga lebih sering berkunjung ke desa-desa, ketika ada kegiatan sosial atau keagamaan yang diadakan masyarakat pasti Masnah Busro akan datang, sedangkan kepemimpinan Baharuddin Mahir ketika ada acara pengajian akbar atau mtq tingkat nasional baru Baharuddin Mahir akan datang berkunjung. Selain itu Bupati sekarang lebih sering turun langsung ke masyarakat baik hanya untuk mengecek kondisi dan sekaligus mendata jalan-jalan yang sangat membutuhkan sentuhan pembangunan untuk menentukan mana yang akan menjadi skala prioritas atau sebaliknya. Seperti di Ketahui Sejumlah Wilayah di Kabupaten Muaro Jambi, yang kondisi Infrastrukturnya rusak parah, seperti ruas jalan Sungai Gelam, Bahar dan Tanjung Katung. Selain itu untuk memberi semangat, Bupati juga

langsung ikut mengontrol proses perbaikan infrastruktur tersebut agar kalau terjadi kendala, Bupati dapat menangani sesegera mungkin.¹⁸

Gambar 1.3
Pembangunan Infrastruktur Yang Rusak



Sumber: Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Potokol Tahun 2018



¹⁸ Ari, Masnah Genjot Pembangunan Infrastruktur. Sumber: http://wartajakarta.co.id/news/detail/masnah_genjot_pembangunan_infrastruktur diakses pada tanggal 21 april 2018 pukul 21.00 wib.

Di lihat dari gambar 1.3 diatas, dibawah kepemimpinan Masnah Busro akan memprioritaskan pembangunan jalan. Hal ini menjawab harapan masyarakat Muaro Jambi yang menginginkan perbaikan jalan yang rusak. Hal tersebut juga didukung dengan berita berikut ini:¹⁹

“Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dibawah kepemimpinan Masnah Busro dan Bambang Bayu Suseno akan memprioritaskan pembangunan jalan. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut Bupati Muaro Jambi mengaku sudah memerintahkan PLT Kepala Dinas PUPR Muaro Jambi untuk turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi dan sekaligus mendata jalan-jalan yang sangat membutuhkan sentuhan pembangunan untuk menentukan mana yang akan menjadi skala prioritas atau sebaliknya.”

Selain itu selama kepemimpinan Bupati Masnah Busro, SE yang selalu suka terjun langsung ke lapangan. Bupati Masnah Busro SE juga dikenal dekat dengan stafnya dan sering memberikan perhatian kepada stafnya. Perhatian terhadap stafnya dapat diwujudkan melalui memberikan penghargaan kepada para staf bawahan yang berprestasi tinggi. Penghargaan itu dapat di wujudkan melalui kata-kata pujian, mengeluarkan piagam penghargaan, kenaikan pangkat, atau bahkan juga mungkin promosi jika keadaan memungkinkan. Seorang pemimpin akan sangat bangga apabila bawahannya menunjukkan kemampuan kerja yang bahkan lebih tinggi dari kemampuannya sendiri. Selain itu Berdasarkan wawancara dengan bagian staf Bupati, Desvita juga mengatakan hal yang sama yaitu:²⁰

¹⁹ Zulkifli, Banyak Infrastruktur Rusak, Masnah Fokus Lakukan Perbaikan. Sumber: <http://jambi.tribunnews.com/2017/10/08/banyak-infrastruktur-rusak-masnah-fokus-lakukan-perbaikan> diakses pada tanggal 21 april 2018 pukul 21.00 wib.

²⁰ Wawancara peneliti dengan Desvita staf Bupati Muaro Jambi, di kantor Bupati Muaro Jambi, pada tanggal 27 juni 2018, pukul 14.30 wib.

“ibu Bupati cukup perhatian kepada kami yang ada di kantor. Beliau selalu memberikan pujian ketika tugas yang diberikan telah selesai dilakukan, misalnya memberikan ucapan bagus dengan mengacungkan jempol kepada kami jika pekerjaan yang dimintanya sudah dikerjakan, selain itu didalam setiap kegiatan atau keputusan yang diambil oleh ibu Bupati, maka beliau selalu melibatkan para stafnya”.

Hal ini membuktikan bahwa tipe kepemimpinan yang digunakan Bupati cenderung lebih melibatkan ikatan emosional yang kuat dengan orang-orang yang dipimpinnya sehingga segala urusan antara pemimpin dan orang yang dipimpin bisa dilaksanakan dengan cara yang lebih menunjukkan perasaan seperti rasa prihatin dan lebih demokratis dimana pemimpin perempuan akan mengajak masyarakat yang dipimpinnya untuk ikut serta terlibat dalam berbagai kegiatan dan tidak secara otoriter dimana pemimpin akan cenderung memberikan perintah kepada bawahan. Nilai demikian tidak dimiliki oleh pemimpin yang otoriter. Juga tidak selalu dimiliki oleh seorang pemimpin yang paternalistik. Tidak pula oleh seorang pemimpin tipe yang kharismatik. Mungkin saja tipe yang *laissez faire* memilikinya hanya saja nilai-nilai tersebut tidak selalu dibarengi oleh tindakan yang senada.

Oleh sebab itu, keberhasilan dari kepemimpinan Bupati Masnah Busro tidak terlepas dari bagaimana gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Bupati Muaro Jambi yaitu Masnah Busro, SE dalam bekerjasama dengan para stafnya serta masyarakat. Tentu menarik untuk mengkaji gaya kepemimpinan dari seorang Bupati yang telah berhasil mencapai hasil yang baik dalam mengelola pemerintahannya. Dimana Bupati Muaro Jambi adalah seorang perempuan dan memiliki banyak tanggung jawab di

dalam kehidupan sehari-hari namun tetap mampu menjadikan Kabupaten Muaro Jambi menjadi lebih maju di berbagai bidang.

Meski Masnah Busro seorang perempuan yang mempunyai sifat lemah lembut dan penuh sopan santun, Masnah bukanlah sosok yang tidak tegas. Terbukti dari beberapa pelanggaran yang dilakukan di wilayah Muaro Jambi. Masnah bahkan sempat marah saat sidak ke sebuah puskesmas dan mendapati puskesmas dalam keadaan kosong. Meski belum banyak melakukan kebijakan dan pembangunan karena memang masa kepemimpinannya bisa di bilang baru dimulai, langkah Masnah di awal-awal masa kepemimpinannya sudah bisa membuktikan perkataannya.²¹

Hal ini ditunjukkan Masnah Busro dengan menerima penghargaan dari Kemenkumham, penghargaan ini diberikan pada pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, karena dinilai peduli terhadap hak asasi manusia (HAM) ini dilihat karena pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menghibahkan 7 hektar tanah kepada Kemenkumham untuk pembuatan lapas kelas II khusus wanita di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Namun Berdasarkan data dari Kemenkumham tahun 2016 di bawah kepemimpinan Burhanudin Mahir, Muaro Jambi mendapat peringkat tertinggi dalam pelanggaran HAM. Ini terkait dengan banyaknya sengketa lahan yang tidak terselesaikan oleh pemerintah Muaro Jambi.²²

²¹ Olivia Admira, Kemenkumham Pemkab Muaro Jambi Pelanggar HAM Terparah di Provinsi Jambi. Sumber: <http://inilah/jambi.com/infrastruktur-di-jambi/kemenkumham-pemkab-muaro-jambi-pelanggar-ham-terparah-di-provinsi-jambi-tahun-2016.html>. diakses pada tanggal 21 juli 2018 pukul 16.08 wib.

²² Dikutip dari <http://haluannews.com/read/16689/bupati-muaro-jambi-terima-penghargaan-dari-kemenkumham.html> diakses pada tanggal 20 juli 2018 pukul 23.05 wib.

